SKRIPSI

PENERAPAN KEBIJAKAN PENARIKAN RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

PUTRI RAMADHANI

NIM. E1032201026

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

PENERAPAN KEBIJAKAN PENARIKAN RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

PUTRI RAMADHANI

NIM. E1032201026

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN KEBIJAKAN PENARIKAN RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

PUTRI RAMADHANI
E1032201026

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Isdairi, M.AB
NIP. 196402181990021001

Tanggal : 15/6/2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 198805072014041002

Tanggal : 15/6/2026

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN KEBIJAKAN PENARIKAN RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh :
Putri Ramadhani
E1032201026

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal : Kamis/ 11 Juni 2026
Waktu : 08:30 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Sidang dan Seminar Fisip Untan

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Isdairi, M.AB	**Bima Sujendra, S.IP, M.Si**
NIP.196402181990021001	**NIP.198805072014041002**
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Drs. Abdul Rahim, M.Si	**Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si**
NIP.196308111990021001	**NIP.198506092015041002**

Disahkan oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya efektivitas pemungutan retribusi sampah di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2025, di mana realisasi penerimaan hanya mencapai Rp 60.000.000 (3%) dari target Rp 2.000.000.000. Dampaknya terjadi penumpukan sampah liar dan degradasi kualitas pelayanan lingkungan di Kecamatan Sungai Kakap. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Kebijakan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 71 Tahun 2021 dengan menggunakan pisau analisis Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *Komunikasi* kebijakan mengalami kemacetan akibat adanya *institutional confusion* dan bias peran antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas PUPRPRKP. (2) *Sumber Daya* pelaksana sangat minim, di mana hanya tersedia 2 orang petugas penagih retribusi untuk wilayah pelayanan yang luas. (3) *Disposisi* pelaksana rendah akibat terbatasnya insentif, pelatihan, dan beban kerja yang tidak proporsional, memicu krisis kepercayaan masyarakat (*willingness to pay* yang rendah). (4) *Struktur Birokrasi* mengalami fragmentasi kewenangan tajam, di mana fungsi edukasi berada di bawah DLH sedangkan fungsi operasional/penarikan berada di bawah Dinas PUPRPRKP, sehingga koordinasi satu pintu tidak berjalan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi kelembagaan pemungutan retribusi secara satu pintu di bawah DLH, penambahan personel lapangan, penyesuaian insentif, serta digitalisasi sistem data guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan pelayanan persampahan yang optimal.

Kata Kunci: ***Penerapan Kebijakan, Retribusi Pelayanan Sampah, Struktur Birokrasi, Fragmentasi Kewenangan.***

ABSTRACT

This study was motivated by the stagnation and failure to achieve the target realization of waste management service levy collection in Kubu Raya Regency in 2025. Based on Regent Regulation Number 71 of 2021, the levy target was set at IDR 2,000,000,000; however, only IDR 60,000,000 was realized, representing approximately 3% of the target. This condition directly affected the limited Local Own-Source Revenue (PAD) available to finance operational activities, maintain waste collection fleets, and provide Temporary Waste Disposal Sites (TPS) in Sungai Kakap District. This study aims to analyze the implementation of the waste management service levy collection policy and its inhibiting factors using George C. Edward III's Policy Implementation Theory, which comprises four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study employed a descriptive qualitative research method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation. Key informants were selected using a purposive sampling technique and consisted of bureaucratic actors responsible for technical policy decisions (the Head of the Sanitation Division of the Department of Public Works, Spatial Planning, Housing, and Residential Areas and the Technical Policy Analyst of the Environmental Agency), field implementers (waste service levy collection officers), and two representatives of levy-paying community members (Mr. Ahmad as a business actor/urban area resident and Mrs. Siti as a resident of an inner-neighborhood settlement area). The findings indicate that the implementation of the waste management service levy collection policy has not been effective due to several structural and sociological constraints: (1) Communication: the dissemination channels for Regent Regulation Number 71 of 2021 were not implemented optimally and failed to adequately reach public awareness at the neighborhood level. (2) Resources: there were financial limitations and a shortage of field levy collection personnel, with only two officers assigned to cover the extensive area of Sungai Kakap District. (3) Disposition: the high workload borne by implementers was not accompanied by adequate incentives, while social resistance emerged due to the community's low willingness to pay, resulting from perceptions of inconsistent waste collection services. (4) Bureaucratic Structure: there was fragmentation of authority and institutional confusion between the educational and regulatory functions under the Environmental Agency (DLH) and the operational and collection functions under the Department of Public Works, Spatial Planning, Housing, and Residential Areas (PUPRPRKP). This study recommends the establishment of an integrated one-stop waste management system, increasing the number of levy collection personnel, and expanding the coverage of waste collection fleets to reach settlement areas located in narrow residential alleys.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management Service Levy, Bureaucratic Structure, Fragmentation of Authority.

RINGKASAN SKRIPSI

Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dalam menyelenggarakan pelayanan publik dasar yang prima, salah satunya melalui pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan. Di Kabupaten Kubu Raya, tata kelola persampahan diatur secara normatif melalui Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Regulasi ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemandirian fiskal daerah melalui konsep *user charges* agar instansi terkait mampu membiayai operasional, merawat armada, dan memperluas cakupan layanan kebersihan secara mandiri tanpa terus bergantung pada anggaran umum. Namun, fakta empiris pada tahun 2025 menunjukkan adanya anomali performa yang sangat tajam, di mana dari target retribusi sampah yang ditetapkan sebesar dua milyar rupiah, realisasi riil yang berhasil dihimpun hanya mencapai enam puluh juta rupiah atau sekitar tiga persen saja.

Kegagalan fiskal ini memicu dampak sistemik berupa melambatnya operasional pengangkutan dan minimnya armada amrol, yang kemudian berujung pada menjamurnya titik pembuangan sampah liar di area permukiman serta bahu jalan Kecamatan Sungai Kakap. Penumpukan tersebut memicu keresahan sosial akibat bau tidak sedap dan risiko kesehatan, yang pada akhirnya membuat masyarakat resisten untuk membayar retribusi karena merasa pelayanan yang diberikan sangat buruk. Akar masalah utama dari stagnasi ini berada pada aspek birokrasi, yaitu adanya fragmentasi kewenangan yang tajam di mana Dinas

Lingkungan Hidup hanya memegang fungsi regulasi dan edukasi di atas kertas, sedangkan fungsi operasional lapangan mulai dari pengangkutan hingga penarikan retribusi justru dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman.

Untuk membedah fenomena tersebut, penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan pisau analisis Teori Implementasi Kebijakan Publik dari George C. Edward III yang mengukur keberhasilan kebijakan melalui empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data primer dalam penelitian ini dihimpun melalui observasi lapangan di Kecamatan Sungai Kakap serta wawancara mendalam bersama Kepala Bidang Kebersihan Dinas PUPRPRKP, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup, petugas penagih lapangan, dan warga selaku wajib retribusi, yang kemudian didukung oleh data sekunder berupa dokumen teknis instansi dan regulasi terkait. Berdasarkan hasil analisis mendalam, ditemukan bahwa variabel komunikasi kebijakan mengalami kemacetan total akibat adanya *institutional confusion* atau kebingungan institusional antara kedua dinas terkait.

Dinas Lingkungan Hidup berasumsi bahwa sosialisasi harus dilakukan oleh Dinas PUPRPRKP selaku eksekutor lapangan, sementara Dinas PUPRPRKP menganggap edukasi adalah tugas mutlak Dinas Lingkungan Hidup sesuai nomenklatur urusan, sehingga ego sektoral ini menyebabkan masyarakat mengalami kebutaan informasi mengenai besaran tarif resmi dan mekanisme pembayaran.

Kondisi tersebut diperparah oleh variabel sumber daya yang mengalami kelangkaan kritis, di mana Dinas PUPRPRKP hanya memiliki dua orang petugas penagih retribusi untuk menjangkau wilayah urban Kecamatan Sungai Kakap yang sangat padat dan luas, sementara sarana prasarana pengangkutan dipaksa bekerja melampaui kapasitas normal untuk melayani timbulan sampah yang mencapai puluhan ton setiap harinya. Dari segi disposisi, komitmen serta motivasi petugas lapangan berada pada tingkat yang rendah akibat beban kerja ekstrem yang tidak diimbangi dengan insentif finansial ataupun pelatihan teknis yang layak, sedangkan di sisi konsumen terjadi fenomena mosi tidak percaya di mana rendahnya kemauan warga untuk membayar retribusi murni disebabkan oleh jadwal pengangkutan sampah yang tidak pasti dan kinerja birokrasi yang lambat.

Terakhir, variabel struktur birokrasi menjadi penghambat paling fundamental karena sinkronisasi data wajib retribusi antara kedua dinas berjalan nihil akibat pencatatan yang masih manual dan belum terintegrasi secara digital, sehingga menghilangkan asas keterpaduan pelayanan satu pintu. Sebagai kesimpulan, penerapan kebijakan penarikan retribusi pelayanan sampah di Kecamatan Sungai Kakap belum berjalan efektif karena terjebak dalam lingkaran setan birokrasi yang disebabkan oleh saluran komunikasi yang macet, kelangkaan kritis personel penagih, rendahnya insentif yang memicu resistensi bayar dari masyarakat, serta fragmentasi urusan yang akut. Untuk mengatasi permasalahan sistemik ini, direkomendasikan adanya reformasi struktur birokrasi berupa integrasi kelembagaan utuh dengan menarik seluruh fungsi operasional persampahan dan pemungutan retribusi secara satu pintu di bawah kendali Dinas Lingkungan Hidup.

Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya melalui penambahan kuantitas petugas lapangan, melakukan peremajaan armada operasional, menyusun ulang skema insentif yang layak untuk memicu motivasi kerja, serta segera melakukan transformasi digital pada sistem pendataan retribusi guna membangun kembali kepercayaan publik demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Ramadhani

Nomor Induk Mahasiswa : E1032201026

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 23 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,

(PUTRI RAMADHANI)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayyah-Nya kepada penulis beserta keluarga, saudara dan orang spesial sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun sedikit telat dari waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Pertama, Ibu Tercinta Saya Tasnima, S.E. Seseorang yang biasa saya sebut Ibunda, wanita hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat dan pemberi nasihat tanpa henti. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk ibunda. Terima kasih telah melahirkan, merawat, membesarkan saya dengan penuh cinta, kesabaran dan kasih sayang, selalu berjuang untuk kehidupan saya dan berdoa tanpa henti untuk anak-anaknya. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan ibunda, terima kasih juga atas semua dukungan mental, finansial, dan segala hal membangun untuk anakmu ini, semoga ALLAH SWT memberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan selalu dihidupmu ibunda.

2. Bapak Mariyono yang biasa saya panggil Ayah, seorang ayah yang juga sangat sabar dalam membesarkan, merawat dan mendidik penulis. Seorang ayah yang telah dengan bangga membesarkan putri bungsunya serta selalu melangitkan doa doa kepada penulis. Saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk ayah. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, nasihan, doa, dan semua hal membangun untuk penulis, terima kasih juga selalu membantu penulis dalam mengurus hal dan segala kebaikan ayah, semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan selalu dihidupmu ayah.

3. Mano Eko Aprizal, S.Pd, Yoni Dwi Akbar, S.IP kedua abang hebat yang telah menjadi penyemangat dan bagian besar dalam hidup penulis. Terima kasih telah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani penulis dalam memberi semangat kepada penulis sampai sekarang, semoga kalian juga selalu diberikan kebahagiaan, keberkahan, dan kesehatan oleh Allah SWT.

4. Rizkya Adha Sari, S.Kom dan Desti Syadryanti, S.Sos kedua kakak terbaik yang juga tak kalah hebat dan menjadi penyemangat dan bagian besar dalam hidup penulis.Terima kasih juga menjadi kakak hebat dan menjadi panutan penulis. Terkhusus kakak penulis yaitu Desty yang selalu bersama penulis dari mulai kuliah di perantauan ini, terima kasih atas nasihat, dukungan, bantuan dan selalu mendengar keluh kesah penulis setiap saat, semoga kalian berdua juga diberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan dihidup oleh Allah SWT.

5. Untuk Muhammad Asyraf Azizi, Seseorang yang amat spesial bagi penulis, orang yang telah bersama penulis dari awal pengerjaan skripsi ini sampai selesai, dan menjadi salah satu alasan serta motivasi penulis untuk selalu semangat semasa penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan, dorongan, motivasi, serta doa yang dilangitkan untuk penulis, terima kasih juga sudah selalu sabar dalam menghadapi penulis selama penulisan skripsi ini dan selalu mendengar semua cerita, keluh kesah penulis. Semoga dihidupmu selalu diberi kebaikan, keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT, dan semoga kita tetap selalu bersama dan beriringan dalam bertumbuh sampai kita tutup usia.

6. Terakhir untuk diri saya sendiri, terima kasih atas segala kerja keras dan semangatmu sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri ini yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga ini semoga tidak habis daya juangnya, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Semoga dirimu juga diberikan keberkahan, kesehatan, kesuksesan, kebaikan, dan semua hal terbaik selalu datang dihidupmu aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah- Nya akhirnya penulisan Skripsi ini yang berjudul "Analisis Pelayanan Kebersihan dan Urgensi Penarikan Retribusi Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya" ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang peneliti dapat kan. Keberhasilan dalam skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herlan. S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Drs. Abdul Rahim, M.Si. selaku Ketua Pengelola PPAPK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak serta menjadi dosen pengganti pembahas penulis yang bersedia memberi waktu, masukan dan bimbingan agar skripsi penulis memiliki kualitas yang baik.
3. Bima Sujendra, S.IP, M.Si, selaku Koordinator Program Studi Ilmu

Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dan juga menjadi Dosen Pembimbing kedua saya yang telah bersedia memberikan arahan, kemudahan, motivasi dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini.

4. Ully Nuzulian, S.I.P., M.Si, selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Isdairi, M.AB, selaku pembimbing utama yang telah bersedia memberikan kemudahan, arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini, baik secara metodologi penelitian serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan skripsi ini.
6. Martinus, S.Sos, M.Si selaku pembahas utama dan A. Risna Sari, S.H., M.Si selaku pembahas pendamping yang telah bersedia memberikan saran dan masukan agar penulisan skripsi ini memiliki kualitas yang baik dan dapat di pertanggungjawabkan secara akademis.
7. Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si, selaku dosen pengganti pembahas yang telah bersedia memberikan waktu, saran serta masukan agar skripsi ini memiliki kualitas baik dan membantu penulis.
8. Wakil dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha Dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam perkuliahan.
9. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kubu Raya, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kubu Raya, dan masyarakat yang bersedia menerima peneliti untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan informasi terkait penelitian ini.

10. Orang tua, keluarga, pasangan dan semua pihak yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Allah SWT, demikian juga skripsi ini walaupun sudah peneliti susun secara maksimal, namun tentunya masih ada kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu peneliti memohon saran dan kritik yang membangun, guna menyempurnakan skripsi ini.

Pontianak, 23 Februari 2026

Putri Ramadhani
E1032201026

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACK ..... **ii**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**
MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 8
1.3 Fokus Penelitian 8
1.4 Rumusan Masalah 8
1.5 Tujuan Penelitian 9
1.6 Manfaat Penelitian 9
1.6.1 Secara Teoritis 9
1.6.2 Secara Praktis 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
2.1 Tinjauan Teoritis 10
2.1.1 Konsep Pelayanan Publik 10
2.1.2 Teori Penerapan Kebijakan 13
2.1.3 Teori Efektifitas Organisasi 20
2.1.4 Konsep Retribusi Daerah 25
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 32
2.3 Kerangka Berpikir 36
2.4 Pertanyaan Penelitian 41
BAB III METODE PENELITIAN **42**
3.1 Jenis Penelitian 42
3.2 Langkah Langkah Penelitian 43
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian 44
3.3.1 Lokasi Penelitian 44
3.3.2 Waktu Penelitian 44
3.4 Subjek Dan Objek Penelitian 46
3.4.1 Subjek Penelitian 46
3.4.2 Objek Penelitian 47
3.5 Teknik Pengumpulan Data 47
3.6 Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data 49
3.7 Analisis Data 50

3.7.1 Teknik Analisis Data 50
3.7.2 Teknik Keabsahan Data 51
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELTIAN 54
4.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kubu Raya 54
4.1.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kubu Raya 54
4.1.2 Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kubu Raya 56
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kubu Raya 58
4.2 Gambaran Umum Dinas Pekerja Umum Dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya 60
4.2.1 Profil Dinas Pekerja Umum Dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya 60
4.2.2 Visi Dan Misi Dinas Pekerja Umum Dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya 62
4.2.3 Struktur Dan Organisasi Dinas Pekerja Umum Dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya 65
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 68
5.1 Hasil Penelitian 68
5.2 Pembahsan 69
5.2.1 Penerapan Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kecamatan 69
1 Komunikasi 69
2 Sumber Daya 72
3 Disposisi 74
4 Struktur Birokrasi 75
5.2.2 Implikasi Penerapan Retribusi Terhadap Kualitas Pelayanan Persampahan Di Kecamatan Sungai Kakap 78
5.3 Implikasi Stagnasi Penerapan Kebijakan Terhadap Efektifitas Organisasi 79
BAB VI PENUTUP 84
6.1 Kesimpulan 84
6.1.1 Komunikasi Yang Tidak Efektif 84
6.1.2 Keterbatasan Sumber Daya 86
6.1.3 Disposisi Pelaksana Yang Tidak Optimal 88
6.1.4 Struktur Birokrasi Yang Tidak Efektif 89
6.2 Saran 90
6.3 Keterbatasan Penelitian 94
DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN 99

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1 Kerangka Penelitian 40

4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kubu Raya.....60

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

2.1 Penelitian Terdahulu.....33
3.1 Waktu Penelitian 45
4.2 Struktur Fungsional Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman.....66
5.1 Rekapitulasi Kendaraan Operasional Bidang Kebersihan 71
5.2 Estimasi Volume Timbunan Sampah Pada 4 Kecamatan Pelayanan Utama....74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

Lampiran 1 90
Lampiran 2 109
Lampiran 3 110
Lampiran 4 111
Lampiran 5 113

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan wilayah. Menurut Sinambela (2014), pelayanan publik pada dasarnya adalah manifestasi dari pemenuhan hak dasar masyarakat yang harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah secara berkualitas dan berkelanjutan. Pelayanan kebersihan bukan sekadar persoalan estetika kota, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin kesehatan lingkungan bagi warganya.

Di Kabupaten Kubu Raya, pengelolaan pelayanan persampahan menjadi domain utama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**,** yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menangani masalah lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup diberi wewenang untuk mengelola retribusi dan pelayanan kebersihan namun dalam realitas penyelenggaraannya pada tahun 2025, efektivitas pelayanan

sering kali terbentur pada keterbatasan sumber daya dan kemandirian anggaran akibat fragmentasi kewenangan. Berdasarkan pengamatan awal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya terlihat masih sangat dominan pada fungsi-fungsi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, aspek operasional pengangkutan sampah di lapangan serta penarikan retribusinya masih dijalankan oleh instansi lain, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP). Hal ini menunjukkan bahwa integrasi sistem pelayanan satu pintu di bawah kendali DLH belum sepenuhnya tercapai.

Gambar 1.1
Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup



Sumber : Media Sosial Dinas Lingkungan Hidup Kubu Raya

Kesenjangan pelayanan ini diperumit oleh rendahnya optimalisasi sektor pendapatan dari jasa layanan persampahan. Sejatinya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menerbitkan instrumen hukum melalui

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Secara normatif, regulasi ini mengatur pedoman teknis pelaksanaan pemungutan retribusi yang berbasis pada aspek legalitas, akuntabilitas, dan pembagian klaster tarif berdasarkan volume limbah domestik maupun komersial. Aturan ini mengamanatkan bahwa setiap penarikan wajib menggunakan instrumen resmi berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan, serta mewajibkan penyetoran hasil pungutan secara berkala oleh petugas administrasi langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (Kasda). Meskipun ada peraturan yang mengatur pemungutan retribusi untuk pelayanan kebersihan, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif.

Tahun	Target Retribusi	Realisasi retribusi	Selisih	Persentase Pencapaian
2025	2.000.000.000	60.000.000	-1.940.000.000	3%

Sumber : Hasil Wawancara Awal Dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan PUPRPRKP

Berdasarkan hasil wawancara awal yang diperoleh dari Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Kubu Raya, meskipun Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 telah mengatur pemungutan retribusi, pada tahun 2025, target retribusi sebesar Rp 2.000.000.000 hanya tercapai sekitar Rp 60.000.000**,** atau sekitar 3% dari total yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada

kebijakan yang mengatur, kendala dalam penerapannya, seperti jumlah petugas yang terbatas hanya dua orang, telah menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini semakin memperburuk kondisi pelayanan kebersihan, karena pendapatan yang diterima dari retribusi tidak mencukupi untuk membiayai sarana kebersihan dan operasional yang dibutuhkan**.** Kehadiran regulasi ini selaras dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang menekankan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa yang diberikan pemerintah. Menurut Mahmudi (2016), dana yang terkumpul dari retribusi sampah merupakan modal vital bagi instansi untuk menciptakan kemandirian fiskal, membiayai perawatan alat angkut, serta meningkatkan kualitas pelayanan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada alokasi anggaran umum daerah yang terbatas.

Namun, hingga tahun 2025, kebijakan retribusi tersebut terlihat belum diterapkan secara maksimal atau mengalami stagnasi dalam penarikannya. Fenomena pelayanan tanpa retribusi ini menimbulkan paradoks dalam manajemen pemerintahan, di satu sisi masyarakat menuntut pelayanan yang rutin, namun di sisi lain unit operasional tidak memiliki dana yang cukup akibat tidak berjalannya fungsi pemungutan retribusi yang telah diatur oleh hukum. Hal ini menyebabkan kualitas pelayanan kebersihan di Kabupaten Kubu Raya menjadi kurang kompetitif karena keterbatasan jumlah armada yang tidak sebanding dengan volume sampah yang terus meningkat.

Gambar 1.2
Kondisi Sampah Di Kecamatan Kubu Raya



Sumber : Diambil oleh penulis di Kecamatan Sungai Kakap

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan rendahnya kesadaran publik serta belum optimalnya cakupan pelayanan pengangkutan yang dilakukan oleh dinas terkait, Minimnya penyediaan tempat pembuangan sampah resmi memicu menjamurnya titik-titik pembuangan sampah liar di area lahan terbuka milik warga. Keberadaan papan peringatan informal dengan narasi sindiran sosial yang ekstrem di tengah tumpukan limbah domestik tersebut menjadi indikator kejenuhan sekaligus bentuk frustrasi sosial masyarakat terhadap lambatnya respons pemerintah daerah.

Gambar 1.3
Artikel Keresahan Warga Terkait Sampah



Kompleksitas masalah persampahan di lokus penelitian semakin dipertegas oleh dokumentasi pemberitaan pada gambar di atas, keresahan mendalam warga di Jalan Karya, Kecamatan Sungai Kakap. Keberadaan tumpukan sampah yang menggunung di bahu-bahu jalan dan dekat area aliran air tidak hanya merusak estetika lingkungan, melainkan juga berpotensi menimbulkan bencana ekologis dan gangguan kesehatan bagi komunitas lokal. Publikasi media massa ini menjadi alat kontrol sosial sekaligus bukti otentik bahwa kegagalan pencapaian target retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Kubu Raya berkorelasi langsung dengan degradasi kualitas pelayanan di lapangan. Ketidakmampuan instansi dalam memungut retribusi secara optimal berdampak sistemik pada keterbatasan anggaran operasional pembersihan, pemeliharaan armada, dan pengawasan wilayah, yang pada akhirnya mengorbankan hak-hak

masyarakat selaku wajib retribusi untuk mendapatkan ruang hidup yang bersih dan sehat.

Gambar 1.3
Artikel Petugas Kebersihan Kebersihan Minim



Jumlah Petugas Kebersihan di Kubu Raya Masih Minim

Tia Rosita - Daerah, Kalimantan

Rabu, 26 Juli 2023 - 13:00

Petugas kebersihan saat bekerja mengambil sampah di Tempat Pembuangan Sampah di Kubu Raya, Rabu (26/7/2023).Suaraindo.id/SUARAKALBAR.CO.ID/ Septa.

Selain permasalahan regulasi dan rendahnya realisasi target fiskal, hambatan mendasar dalam implementasi kebijakan pengelolaan kebersihan di Kabupaten Kubu Raya terletak pada keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) lapangan. Dokumentasi publikasi media pada gambar di atas menegaskan bahwa jumlah petugas kebersihan yang dikerahkan untuk melakukan pengangkutan sampah di wilayah Kubu Raya masih sangat minim dan belum proporsional dengan luas wilayah serta volume timbulan sampah harian. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek sumber daya (*resources*), khususnya staf atau aparat pelaksana, merupakan pilar krusial yang menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan kebijakan. Kelangkaan jumlah petugas di lapangan ini memicu terjadinya penumpukan sampah yang tidak terangkut di berbagai titik pemukiman warga. Kondisi keterbatasan SDM ini pada akhirnya menciptakan lingkaran setan (*vicious circle*) dalam tata kelola retribusi: pelayanan pengangkutan sampah dari dinas menjadi lambat dan tidak merata, yang kemudian memicu mosi tidak percaya dari masyarakat berupa penolakan atau keengganan untuk membayar retribusi sampah bulanan karena merasa tidak mendapatkan kompensasi pelayanan yang prima. Kondisi minimnya SDM yang diberitakan oleh media tersebut diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kebersihan Dinas PUPRPRKP, yang menyatakan bahwa jumlah petugas kebersihan saat ini memang belum ideal untuk mencakup seluruh wilayah pelayanan di Kabupaten Kubu Raya.

Seperti yang dilihat pada data di atas khususnya di Kecamatan Sungai Kakap permasalahan sampah masih belum optimal, fenomena munculnya tempat sampah liar ini menunjukkan kondisi dimana masih minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah. Tumpukan sampah yang tidak terkelola baik di pinggir jalan karena adanya celah antara volume timbulan sampah harian dengan frekuensi pengangkutan yang dilakukan oleh dinas terkait. Keterbatasan jumlah personel kebersihan dan sarana prasarana di Kabupaten Kubu Raya dengan ketidakseimbangan antara luas wilayah pelayanan memicu terjadinya penumpukan sampah di berbagai titik strategis yang luput dari jangkauan petugas. Adanya upaya mandiri

masyarakat dalam memasang papan larangan membuang sampah menjadi indikasi adanya keresahan sosial terhadap penurunan kualitas lingkungan di wilayah permukiman. Seperti yang diungkapan oleh salah satu warga yaitu

”*Kami warga setempat sangat resah karena ini salah satu pencemaran limbah walaupun limbah tidak berbahaya tapi juga bisa mengganggu kesehatan kita (bagi warga) yang melintas.”Ujarnya*

“Kepada dinas terkait agar dapat memindahkan tumpukan sampah tersebut agar jangan ada pencemaran(mengganggu kesehatan) di lingkungan kami carilah tempat yang jauh dari keramaian atau pemukiman warga agar tidak mengganggu kesehatan warga, jika dekat pemukiman dan di pinggir jalan begini kan warga susah dan repot akibat bau tak sedap dari tumpukan sampah tersebut,”Tandasnya.

Sumber : Kutipan di ambil dari salah satu berita

Keresahan warga yang berujung pada aksi protes dan desakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, menunjukan bahwa isu pengelolaan sampah telah menjadi prioritas mendesak yang memerlukan intervensi kebijakan segera. Permasalahan ini juga menjadi membuat masyarakat enggan membayar retribusi jika pelayanan pengangkutan masih minim, yang dibuktikan dengan banyaknya tumpukan sampah liar di pemukiman.

Berdasarkan kondisi tersebut, sangat urgen untuk melakukan kajian mendalam mengenai hambatan koordinasi antar-instansi dan pentingnya penarikan retribusi sebagai solusi jangka panjang bagi peningkatan pelayanan. Analisis mengenai kaitan antara penarikan retribusi dengan peningkatan kualitas layanan menjadi kunci untuk memperbaiki kinerja birokrasi di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Stagnasi

penarikan retribusi yang hanya mencapai 3% pada tahun 2025 ini , jika ditelaah lebih mendalam, tidak dapat dilepaskan dari persoalan Komunikasi kebijakan yang belum menyentuh kesadaran publik , keterbatasan Sumber Daya finansial dan petugas lapangan , rendahnya Disposisi pelaksana akibat beban kerja , serta adanya Struktur Birokrasi yang terfragmentasi antara fungsi edukasi di Dinas Lingkungan Hidup dan fungsi operasional di Dinas PUPRPRKP. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana dinamika penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Melalui pendekatan Teori George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), penelitian ini diharapkan mampu mengurai benang kusut hambatan birokrasi dan tata kelola yang terjadi, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi optimalisasi penarikan retribusi pelayanan sampah di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **" Penerapan Kebijakan Penarikan Retribusi Pelayanan Sampah Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya"**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pelayanan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya belum optimal karena adanya pembagian fungsi yang belum terintegrasi antara edukasi (DLH) dan operasional pengangkutan serta retribusi (PUPRPRKP).

2. Tidak jalannya penarikan retribusi sampah sesuai Perbup Nomor 71 Tahun 2021 yang mengakibatkan rendahnya PAD untuk membiayai sarana kebersihan.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada penerapan kebijakan retribusi kualitas pelayanan kebersihan tahun 2025 di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kebijakan penarikan retribusi pelayanan persampahan di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 jika ditinjau dari teori George C.Edward III?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan penarikan retribusi pelayanan persampahan di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Perbup Nomor 71 Tahun 2021 ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor faktor penghambat yang memengaruhi penerapan kebijakan penarikan retribusi pelayanan

persampahan dan koordinasi antar instansi dalam pelayanan persampahan tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

   Memperkaya kajian Ilmu Pemerintahan terkait tata kelola pelayanan publik dan penerapan kebijakan di daerah yang mengalami fragmentasi kewenangan.

2. Manfaat Praktis :

   Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menyinkronkan peran DLH dan PUPRPRKP dalam mengaktifkan retribusi demi kemandirian anggaran.